

4-30-2000

## "Buku Putih" Masa Pendudukan Jepang

Dwi Mulyatari

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana>

---

### Recommended Citation

Mulyatari, Dwi (2000) ""Buku Putih" Masa Pendudukan Jepang," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*: Vol. 2: No. 1, Article 10.

DOI: 10.17510/wjhi.v2i1.277

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol2/iss1/10>

This Book Review is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

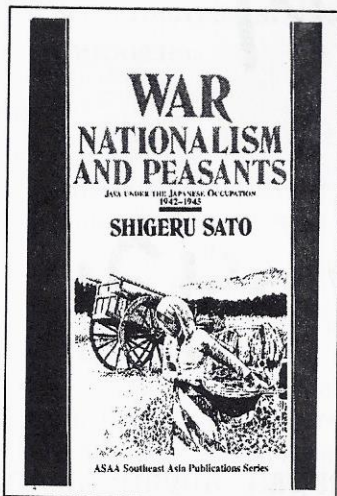
## SEJARAH

### *"Buku Putih" Masa Pendudukan Jepang*

Shigeru Sato, *War, Nationalism and Peasants: Java Under the Japanese Occupation 1942 – 1945* (Sydney: Allen & Unwin Pty.Ltd., 1994), xx + 280.

Dwi Mulyatari

*Universitas Indonesia*



Masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan salah satu periode yang sangat penting dalam sejarah negeri ini. Masa itu sering dipandang sebagai latar belakang terjadinya revolusi dalam masyarakat maupun politik bangsa Indonesia dalam usaha memerdekakan diri dari penjajahan.

Pada awalnya penelitian tentang masa pendudukan Jepang tidak banyak dilakukan, baik oleh sejarawan Barat, Indonesia maupun Jepang sendiri. Salah satu kendala adalah sulitnya memperoleh sumber-sumber mengenai periode itu. Namun, memasuki tahun 1980-an, minat untuk meneliti masa pendudukan Jepang di Asia Tenggara,

khususnya Indonesia, terus meningkat. Salah satunya adalah karya Sato ini.

Sebagai seorang Jepang yang lahir tidak lama sesudah perang, Sato (lahir di Jepang tahun 1950) merupakan salah seorang dari generasi pasca-perang Jepang yang turut merasakan betapa terhinanya bangsa dan negaranya oleh pendapat umum yang mengatakan bahwa Jepang sebagai satu-satunya pihak yang bersalah dalam Perang Dunia II di Asia Tenggara. Sato merasakan tuduhan internasional tersebut tidak adil karena banyak faktor turut berperan dalam menciptakan kondisi buruk pada masa perang di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Maka, penelitian yang dilakukan oleh Sato ini dapat dikatakan sebagai "buku putih"-nya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sato berusaha bersikap seobyektif mungkin sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa Jepang bukanlah satu-satunya pihak yang bersalah dalam "menciptakan" kondisi perang yang buruk di Indonesia, yang terutama dirasakan oleh kalangan petani di Jawa.



Buku dengan pendapat yang menarik ini semula merupakan penelitian Sato untuk memperoleh gelar doktor di Griffith University, Australia. Terdiri dari tujuh bab yang terbagi dalam dua bagian, karya ini juga dilengkapi dengan grafik dan tabel yang penting, peta, dan lirik dari sebuah lagu yang pernah digunakan sebagai alat propaganda pemerintah pendudukan Jepang.

Dalam bukunya, Sato menganalisis implikasi dari perang dan pendudukan Jepang itu sendiri bagi kalangan birokrat dan petani Jawa. Ia berpendapat bahwa banyak orang tidak sungguh-sungguh mengerti apa sebenarnya implikasi dari peristiwa-peristiwa tersebut pada masyarakat di Jawa. Untuk membuktikan pendapatnya, Sato menguraikan keadaan buruk yang dialami petani Jawa akibat pendudukan Jepang; dengan diterapkannya *forced rice-delivery* dan *forced labour* oleh pemerintahan militer Jepang di bawah kebijakan "*Total-War Mobilisation*". Dari temuannya Sato berpendapat bahwa keadaan buruk yang dialami para petani Jawa saat itu merupakan akibat dari perang itu sendiri, berkembangluasnya ideologi perang Jepang, kurangnya pengalaman dan pemahaman para personel Jepang terhadap situasi di Indonesia, penerapan manajemen pemerintahan yang salah, dan perlakuan yang tidak tepat terhadap petani Jawa. Sato juga membahas pengaruh positif pendudukan Jepang terhadap kaum birokrat Jawa yang mendapatkan kesempatan untuk memainkan peran yang sangat penting selama masa pendudukan yang berguna untuk mempersiapkan diri dalam perang kemerdekaan Indonesia.

Pada bagian pertama buku ini, yang terdiri dari empat bab, Sato membahas kebijakan-kebijakan utama pemerintah pendudukan Jepang dalam upaya mereka untuk mengerahkan sumber daya manusia dan sumber alam yang ada di Indonesia secara total, khususnya di Jawa, agar dapat memenangkan Perang Pasifik. Pertama-tama, Sato melihat ke belakang dengan mempelajari hubungan baik yang pernah tercipta antara Jepang dan Hindia Belanda jauh sebelum perang. Hubungan itu kian memburuk menjelang pecahnya perang karena meningkatnya ekspansi Jepang ke daerah selatan termasuk Hindia Belanda, yang dilandasi oleh motivasi ekonomi, sehingga membawa hubungan kedua negara menjadi tegang. Ketegangan hubungan diakhiri dengan serangan Jepang atas Hindia Belanda, menyusul kebijakan embargo minyak Amerika Serikat terhadap Jepang dan gagalnya negosiasi dagang antara Jepang dengan Hindia Belanda. Jepang menuntut ditingkatkannya ekspor minyak dari Hindia Belanda ke Jepang. Sato berkeyakinan bahwa keberadaan institusi-institusi maupun orang-orang Jepang di Hindia Belanda sebelum perang, dalam skala tertentu, turut



berperan dalam tindakan-tindakan spionase untuk mempersiapkan penyerangan tersebut.

Dalam bab selanjutnya, Sato membahas tentang kesalahan manajemen pemerintahan pada masa awal pendudukan Jepang dan tentang usaha Jepang untuk mengganti pejabat tinggi Belanda di dalam struktur administrasi Hindia Belanda dengan membuka kesempatan bagi para birokrat Indonesia untuk berperan dalam Pemerintahan Militer, sementara menunggu tenaga administrasi Jepang tiba dari Tokyo. Jepang juga menerapkan pendekatan yang berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola administrasi negara. Jepang lebih senang menerapkan sistem pemerintahan langsung dengan struktur pemerintahan yang berbentuk piramida ketimbang sistem tidak langsung seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Di samping mempekerjakan kalangan birokrat Indonesia, melalui berbagai bentuk organisasi politik seperti Gerakan 3A, Putera, dan sebagainya, Jepang juga mengembangkan perasaan antikolonialisme di antara kaum nasionalis Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, Jepang sadar dan khawatir bahwa sentimen antikolonialisme itu akan menghantam diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang melakukan pengarahannya yang ketat atas bergeraknya berbagai organisasi itu. Organisasi akan segera dibubarkan jika kegiatan propaganda yang diharapkan oleh pemerintah tidak mencapai target yang diinginkan.

Dalam empat penulis buku ini mengakui memburuknya situasi perang bagi pihak Jepang telah mendorong Jepang untuk memberikan berbagai konsesi pada kaum nasionalis Indonesia, dalam bentuk partisipasi politik dan janji kemerdekaan di kemudian hari. Konsesi itu diberikan dengan harapan Jepang tetap mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dalam upaya memenangkan perang Asia Timur Raya.

Pada bagian kedua buku ini, Sato membahas akibat dari kebijakan "*Total-War Mobilisation*" yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang terhadap kaum petani Jawa, yang oleh Sato dikategorikan sebagai korban yang pasif.

Dalam bab lima digambarkan kondisi umum petani Jawa sebelum perang berlangsung. Para petani menggantungkan hidupnya pada panen semata dan standar hidup mereka relatif rendah. Sedikit saja perubahan terjadi pada sistem tanam padi akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Sistem irigasi yang diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda meningkatkan dua bahkan kadang sampai tiga kali lipat dari hasil panen biasa. Sato berpendapat bahwa tujuan yang mendasar dari



kebijakan beras di Jawa yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang adalah untuk mengontrol pembagian surplus beras yang dihasilkan oleh suatu desa sehingga terjadi pemerataan dari daerah yang kaya dengan yang minus beras. Kebijakan serupa diterapkan pula di Jepang. Namun rupanya kebijakan yang cocok bagi Jepang tidak tepat untuk diterapkan di Jawa, karena terdapat perbedaan infrastruktur ekonomi dan kondisi sosial-politik di antara keduanya. Lagi pula Sato mengklaim bahwa berkurangnya kebutuhan sehari-hari, seperti tekstil, obat-obatan dan bahan makanan tertentu, sudah terjadi sebelum kedatangan Jepang di Indonesia. Sato juga menekankan bahwa pemerintah pendudukan Jepang tidak mengirimkan beras ke Jepang, sebagaimana diyakini oleh beberapa sejarawan, melainkan ke wilayah-wilayah lain di Asia yang berada di bawah teritori pendudukan Jepang, bahkan juga untuk konsumsi para *romusha* Indonesia yang berada di medan pertempuran.

Sato membahas pula kalangan pangreh praja yang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia berperan kuat dalam melakukan tekanan-tekanan kepada para petani untuk memenuhi tuntutan kuota beras yang ditentukan oleh pemerintah. Di samping itu, Sato membahas para pedagang perantara Cina, yang menurutnya, sedikit banyak turut bertanggung jawab atas munculnya perdagangan beras di pasar gelap. Menurut Sato, dibandingkan pada masa sebelum perang, ekspor beras dari Jawa sangat menurun pada masa pendudukan. Kondisi pelayaran pengangkutan beras yang sangat berbahaya pada masa perang merupakan salah satu faktor penyebabnya. Sato juga berpendapat bahwa pemberontakan petani di Jawa mengakibatkan berkurangnya hasil beras sehingga menyebabkan tidak berhasilnya sistem penyerahan padi yang diterapkan pemerintah. Kegagalan pemerintah pendudukan Jepang dalam menerapkan kebijakan beras di Indonesia sebagian disebabkan oleh kurangnya koordinasi di antara administrator Jepang karena sulitnya komunikasi yang seharusnya dilakukan secara intensif. Juga tipisnya pengalaman pemerintahan di kalangan administrator Jepang menyebabkan kurangnya pemahaman Pemerintah Pendudukan terhadap kondisi di Indonesia. Kalangan *Sanyo* (orang Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai penasihat pemerintah), menurut Sato, juga dituduh sebagai penyebab kegagalan kebijakan beras pemerintah.

Selain sumber daya alam, Jepang juga menekankan "*total-war mobilisation*" terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Dalam bab terakhir dari bagian kedua ini, Sato mengulas tentang jumlah orang Indonesia yang dijadikan *romusha* oleh Jepang dan situasi serta kondisi kerja mereka. Sato



merasa bahwa banyak kalangan sejarawan berpendapat berat sebelah dalam melihat kondisi para *romusha* yang harus bekerja selama pendudukan Jepang. Menurut Sato, pandangan ini disebabkan oleh karena pemahaman kata "romusha" umumnya diartikan sebagai tenaga kerja paksa yang direkrut oleh pemerintah pendudukan Jepang dan dikirim keluar Jawa—bahkan sampai ke Burma dan Siam—untuk mengerjakan pekerjaan kasar dan berat tanpa imbalan sepeser pun. Dalam hal ini Sato mengutip M. C. Ricklefs dan Nugroho Notosusanto (halaman 154–5) yang pendapat-pendapatnya—menurut Sato—diyakini secara luas mempengaruhi pendapat para sejarawan lainnya. Padahal, menurut Sato, pendapat yang demikian tidak sepenuhnya benar. Bahkan Sato membantah, sebagian besar para *romusha* ini justru ditempatkan di Pualu Jawa, yang kondisi kerjanya tidak lebih baik dari kondisi kerja di luar Jawa.

Untuk sampai pada kesimpulannya bahwa Jepang bukanlah satu-satunya pihak yang bersalah dalam menciptakan penderitaan yang dialami orang Indonesia, khususnya para petani Jawa, pada masa pendudukan Jepang, Sato menekankan ada faktor penentu lain di luar pendudukan Jepang itu sendiri. Karakter dan gaya hidup orang Jawa, akibat-akibat kolonisasi Barat, dan pengaruh dari perang itu sendiri, dituding Sato sebagai faktor-faktor utama penyebab penderitaan petani di Jawa.

Akhirnya, Sato mengajak para pembaca buku ini untuk lebih memahami dan melihat kondisi perang di Jawa pada masa pendudukan Jepang secara lebih arif. Karena ia pun dalam melakukan penelitiannya berusaha "untuk memijakkan kaki" di masing-masing sisi yang berlawanan, yaitu Indonesia sebagai pihak yang diperintah dan Jepang sebagai pemerintah. Betapapun kuatnya upaya Sato untuk bersikap seobyektif mungkin dalam membuat analisis dan kesimpulan, hal yang tidak dapat disembunyikannya adalah dalam pemilihan kata yang tetap menunjukkan keberpihakannya. Sato lebih memilih kata "pihak yang diperintah" dan "pihak yang memerintah" untuk menyebut Indonesia dan Jepang, daripada kata "yang dijajah" dan "yang menjajah". Hal itu menunjukkan bahwa, bagi Sato, Jepang tidaklah sama dengan Belanda ketika keduanya memerintah di Indonesia.

Namun demikian, melalui penelitian yang lengkap dan mendalam, dengan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder, baik sumber Indonesia, Belanda, Australia maupun Jepang—dimana Sato tentunya tidak menemui kesulitan dalam berbahasa Jepang—membuat argumen-argumennya praktis terdukung oleh sumber-sumber tersebut. Dapat dikatakan Sato sukses dalam mencari pendukung dari opini-opininya tersebut, melalui bukti-bukti yang solid dari sumber-sumber sejarah yang digunakannya.